

PEMIKIRAN POLITIK ALI HASJMY**Zulfata****(Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry)**

Email : fatazul@gmail.com

Abstrak

Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit tentang bentuk negara Islam. Kenyataan ini telah menciptakan dinamika dalam pandangan beberapa cendekiawan muslim tentang konsep negara Islam. Implikasinya, diskursus negara Islam terus memuncak pasca runtuhnya sistem kekhalifahan Turki Usmani (1924 M). Para cendekiawan muslim yang aktif membahas konsep negara Islam tersebut di antaranya adalah Fazlurrahman, Taha Husain, Muhammad Natsir, dan Ali Hasjmy. Tesis ini fokus pada permasalahan pemikiran politik Ali Hasjmy, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep negara Islam menurut Ali Hasjmy, dan epistemologi pembentukan negara Islam yang dibangun oleh Ali Hasjmy. Beberapa fokus permasalahan di atas akan diteliti dengan menggunakan integrasi teori negara Islam yang dikembangkan oleh beberapa cendekiawan muslim. Integrasi teori tersebut diterapkan dalam metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kritis terhadap beberapa karya-karya Ali Hasjmy. Hasil dari penelitiannya ini ditemukan bahwa pemikiran politik Ali Hasjmy bercorak teologis interkoneksi, sehingga konsepsinya tentang negara Islam mengandung nilai keagamaan, ekonomi, politik dan kemanusiaan. Epistemologi pembentukan negara Islam yang dibangun oleh Ali Hasjmy berlandaskan dengan prinsip ketauhidan dan *ukhuwah islamiyah*. Ali Hasjmy secara tidak langsung menegaskan bahwa wujud negara Islam tidak memiliki batas akhir, sehingga negara Islam hanya dapat dipahami melalui pemikiran yang bersifat universal. Dari itu, konsepsi negara Islam yang digagas oleh Ali Hasjmy telah memenuhi unsur-unsur epistemologi dan penting untuk dipertimbangkan dalam proses penerapan negara Islam di level Internasional.

Keywords: *Ali Hasjmy, Epistemologi, Negara Islam***Abstract**

The Quran does not explain explicitly about the form of the Islamic State. This reality has created dynamics in view of some Muslim scholars about the concept of an Islamic State. By implication, the Islamic State of discourse continues to escalate the post-war collapse of the caliphate system of Ottoman Turkey (1924 M). The Muslim scholars who actively discuss the concept of the Islamic States were Fazlurrahman, Taha Husayn, Muhammad Natsir, and Ali Hasjmy. This thesis focus on the political thought of Ali Hasjmy, values that are contained in the concept of an Islamic State, according to Ali Hasjmy, and epistemology of Islamic State formation built by Ali Hasjmy. Some of the above problems will be

examined by using the integration theory of the Islamic State developed by several Muslim scholars. The integration theory is applied in qualitative research methods with the approach of critical study on some works of Ali Hasjmy. The result of this research found that the style of political thought of Ali Hasjmy is a theological-interconnected meaning Islamic countries contain the value of religious, economic, political and humanitarian. The Islamic State's epistemology built by Ali Hasjmy are based on principles of *Ukhuwah Islamiyah*. Ali Hasjmy indirectly confirmed that the existence of the Islamic State has no deadline, so that Islamic countries can only be understood through the mind that is universal. Moreover, the conception of the Islamic State that was initiated by Ali Hasjmy meet elements of epistemology and critical to consider in the process of implementation of Islamic countries at the international level.

Keywords: Ali Hasjmy, Epistemology, Islamic State

A. Pendahuluan

Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk negara Islam yang harus diaplikasikan oleh umat manusia, hal ini dapat diketahui melalui sejarah perjuangan Nabi Muhammad Saw dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.¹ Implikasi dari argumen tersebut menimbulkan wacana-wacana tentang bentuk negara Islam yang terus muncul seiring dengan perspektifnya para tokoh-tokoh termasyur di dunia.² Berbagai perspektif para tokoh tersebut tentunya memiliki landasan kerangka berfikir tertentu dalam memaknai negara Islam.

Keberagaman makna dalam upaya mengonsepsikan negara Islam sulit dihindari, terlebih manusia selalu aktif dengan aktifitas politik yang dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan umat manusia.³ Tidak hanya itu, nilai-nilai politik juga mempunyai titik temu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.⁴ Dalam konteks studi pemikiran, keberagaman dalam menentukan bentuk negara Islam para tokoh memunculkan ide-ide cemerlang yang berangkat dari proses analisis kritis terhadap nilai-nilai yang tersimpan dalam sistem sosial keagamaan lingkungan mereka.⁵

¹Sukron Kamil, *Pemikiran Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm.29

²M. Aunul Abied Shah, dkk, *Islam Garda Depan: Muzaik Pemikiran Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 39

³Abu A'la Maududi, *Hukum Pemerintahan Islam*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1990), hlm.30

⁴Mahmud Saleh, *Pemikiran Muhammad Natsir dan Hasan Al-Banna tentang Negara Islam*, (Banda Aceh: Lhee Sagoe, 2015), hlm.5

⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm.195

Dinamika wacana konsep politik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh muslim menjadi bahan yang menarik untuk ditelusuri.⁶ Tokoh-tokoh muslim tersebut di antaranya adalah Fazlur Rahman yang telah sukses menarik perhatian para akademisi dalam mendiskusikan wacana pemikiran politik dalam konteks sejarah Islam di tingkat Internasional. Penting untuk dipahami bahwa kualitas konsepsi tokoh sangat ditentukan oleh pengalaman keilmuannya, baik yang dipengaruhi secara individual maupun kelompok. Hal ini dapat dipahami melalui beragamnya nomenklatur tentang konsep politik ideal yang diusulkan oleh para tokoh.⁷ Misalnya, konsep politik ideal sering kali dihubungkan dengan konsep kekhalifahan, kerajaan, demokrasi maupun teokrasi.⁸ Uniknyanya semua nomenklatur di atas dimainkan oleh organisasi massa yang sangat berperan dalam menentukan nasib peradaban Islam dari masa ke masa.

Kontestasi Islam dalam perkembangan perpolitikan di berbagai negara telah menciptakan variasi tipologi pemikiran politik yang ditawarkan pada setiap negara yang warga negaranya mayoritas muslim.⁹ Upaya untuk menerjemahkan Islam (universal) ke ranah perilaku politik merupakan pekerjaan besar bagi kalangan cendekiawan muslim. Kompleksitas nilai yang terkandung dalam Islam diyakini sebagai prinsip untuk mencari konsep ideal dalam mendirikan negara yang sesuai dengan cita-cita bersama. Memahami Islam, negara dan politik yang tidak berlandaskan cita-cita rakyat, secara tidak langsung memunculkan konsep negara sekuler mulai diperbincangkan oleh cendekiawan muslim, sehingga kontroversial antar pendukung negara Islam dan negara sekuler terus menjamur dalam studi pemikiran politik Islam pada abad ke-19 M.¹⁰ Berkembangnya diskursus konsep negara Islam muncul sebagai upaya para cendekiawan muslim untuk menjadikan negara sebagai media penerapan hukum-hukum Allah Swt dalam aktivitas sosial yang dijalani umat manusia.¹¹

Agama Islam tidak dapat diaplikasikan secara menyeluruh (*kaffah*) ke dalam kehidupan publik tanpa adanya sistem negara yang sesuai dengan ajaran agama

⁶Philip K. Hitti, *History of the Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), hal. 146

⁷Ahmed Vaezi, *Pemikiran Politik Syi'ah*, terj. Ali Syahab, (Jakarta: Penerbit Citra, 2006), hlm. 8

⁸M. Aunul Abied Shah, dkk, *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.58

⁹M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta*, cet.V, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.41

¹⁰Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, (Magelang: Yayasan Indonesia Sejahtera, 2001), hlm.2001

¹¹Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm.82

Islam.¹² Upaya penyesuaian antara Islam dan negara itulah yang mengakibatkan para cendekiawan muslim berbeda pandangan dalam mengonsepsikan negara yang sesuai dengan ajaran agama Islam.¹³ Kompleksitas nilai yang terdapat dalam ajaran Islam secara tidak langsung telah memberikan instrumen analisis kepada cendekiawan muslim dalam menginterpretasikan pemikiran-pemikirannya.

Berbagai pandangan cendekiawan muslim dalam menyesuaikan antara negara dengan Islam melahirkan beberapa macam teori dan pendekatan pemikiran politik.¹⁴ Pendekatan pemikiran politik tersebut di antaranya adalah pendekatan teologis, antropologis, sosiologis dan modernis.¹⁵ Ketika berbagai pendekatan tersebut menjadi sebuah konsepsi bagi cendekiawan, benturan konsepsi antar cendekiawan pun terjadi, sehingga memicu lahirnya konsepsi-konsepsi tentang negara yang sesuai dengan Islam.¹⁶ Hal ini terus terjadi seiring perkembangan negara yang mayoritas pemeluknya umat muslim.

Perbedaan pandangan antara cendekiawan muslim terus bermunculan seiring dengan keadaan demografi, historis dan kultural yang dialami oleh cendekiawan tersebut. Akibatnya, tidak jarang para akademisi yang meneliti tentang negara dan Islam sering menyebut negara sesuatu identik dengan negara Islam. Negara-negara yang sering disebut sebagai negara Islam di antaranya adalah Pakistan, Iran dan Arab Saudi.¹⁷ Gejala negara yang mengklaim sebagai negara Islam tersebut sangat sulit dihindari karena istilah negara Islam telah banyak diabadikan di berbagai tulisan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga tidak lepas dari polemik tentang negara Islam. Hal ini dapat dipahami melalui karya-karya tokoh di Indonesia seperti Muhammad Natsir, Nurcholish Madjid, dan Abdurrahmad Wahid. Tokoh-tokoh tersebut telah menjadi aktor utama dalam perkembangan pemikiran politik yang menghubungkan negara dan Islam.¹⁸ Khusus di Aceh, terdapat seorang tokoh yang berkontribusi dalam aktivitas sosial politik di Aceh, tokoh tersebut lebih akrab dikenal dengan sebutan Ali Hasjmy. Ali Hasjmy cukup

¹²M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita-Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.51

¹³M. Arskal Salim GP, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm.46

¹⁴Tariq Ramadan, *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat dan Tantangan Modernitas*, terj. Zubair, Ilham B.Sainong, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm.93

¹⁵Varma Sp, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm.37

¹⁶Fachry Ali, Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.77

¹⁷Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran: Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.169

¹⁸Faisal Ismail, *Ketegangan Kreatif Peradaban Islam: Idealisme Versus Realisme*, (Jakarta: Bakti Aksara Persada, 2003), hlm. 49

serius membicarakan pemikiran politik dalam pendekatan studi kebudayaan yang bersifat integratif dan interkonektif. Ali Hasjmy merupakan salah satu tokoh di Aceh yang sangat baik dalam merawat hubungan dengan tokoh-tokoh besar di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Ali Hasjmy memiliki hubungan yang baik dengan persiden Soekarno maupun Soeharto. Hubungan tersebut terjadi ketika Ali Hasjmy menjabat sebagai orang pertama di Provinsi Aceh (Gubernur) dan sebagai rektor IAIN Ar-Raniry.¹⁹ Dari itu, pemikiran politik Ali Hasjmy penting untuk dipahami.

Pengalaman hidup yang dimiliki Ali Hasjmy telah mampu menarik perhatian masyarakat Aceh, khususnya dalam pergerakan politik yang dilakoninya, baik melalui kebijakan politik maupun melalui tulisan-tulisan yang diterbitkannya. Salah-satu pemikiran politik yang belum pernah diangkat secara serius oleh akademisi dalam hal memahami pemikiran politiknya adalah konsep negara Islam yang terkandung dalam beberapa karyanya.

Pengaruh dari pemikiran politik Ali Hasjmy di Aceh secara tidak langsung telah membentuk karakter kepemimpinannya yang cenderung menjaga dan mengembangkan sistem kebudayaan yang disajikan dengan pendekatan pendidikan. Hal ini dapat dipahami melalui inisiatifnya dalam mengajak tokoh-tokoh nasional pada kepemimpinannya untuk membangun kota pelajar dan mahasiswa (KOPELMA) di Aceh.²⁰ Program pembangunan KOPELMA tersebut telah menjadikan khazanah pendidikan di Aceh terklasifikasi dengan baik. Sejarah perkembangan Aceh sulit dipisahkan dengan usaha-usaha Ali Hasjmy dalam menjaga nilai nasionalisme di Aceh ketika gerakan Darul Islam dan Tentara Islam (DI/TII) berkembang di Aceh. Hal ini terwujud karena tipologi pemikirannya bersifat integrasi antara Islam dan nasionalis.

Proses kontekstualisasi hasil pemikiran klasik juga pernah dilakukan oleh Ibnu Khaldun yang mencoba mengurai kembali tentang makna khilafah pada masa kakacauan politik yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah dengan sekelompok gerakan Husein dan Hasan. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa proses pemaknaan khalifah dapat dipahami melalui pendekatan *ashabiyah* yang proses akhir menghasilkan makna khilafah secara idealis dan realis.²¹ Tidak hanya makna khilafah yang mengalami perbedaan dalam pemikiran cendekiawan muslim, permasalahan negara Islam pun mengalami perbedaan yang signifikan,

¹⁹M. Hasbi Amiruddin, dkk, *Biografi Rektor IAIN Ar-Raniry: Kepemimpinan IAIN Ar-Raniry dari Masa ke Masa*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.63

²⁰Ali Hasjmy, *Darussalam*, (Banda Aceh: tp, tt), hlm. 33

²¹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 188

hal ini dapat dipahami melalui proses pembentukan negara Islam yang dikembangkan para cendekiawan muslim tersebut.

Filosof muslim yang bernama Al-Farabi menginterpretasikan bahwa negara ideal akan terwujud ketika proses interaksi *bottom-up* yang terjadi di masyarakat dapat diterapkan, melalui argumen tersebut secara tidak langsung Al-Farabi ingin menyampaikan bahwa dengan proses interaksi *bottom-up* dapat menampung segala aspirasi-aspirasi masyarakat yang benar benar objektif. Kemunculan perbedaan pendapat dalam mendefinisikan negara Islam tidak dapat dihindari, mengingat perbedaan tersebut tidak hanya terjadi pada cendekiawan muslim, baik di luar Indonesia maupun di internal Indonesia. Sama halnya di Aceh, Ali Hasjmy telah berani mengonsepsikan dan mendefinisikan negara Islam yang berbeda dengan beberapa cendekiawan muslim sebelumnya.

Pasca terbitnya buku Ali Hasjmy yang berjudul “*Di Manakah Letak Negara Islam*”, dan berbagai jabatan strategis yang didudukinya seperti jabatan gubernur Aceh, rektor, dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Aceh. Secara tidak langsung telah menginformasikan bahwa pemikiran politiknya penting untuk dipertimbangkan dalam konteks perkembangan pemikiran politik di Aceh. Berkaitan dengan karyanya tersebut, Ali Hasjmy secara tegas menyatakan bahwa negara Islam wajib diterapkan di permukaan bumi ini.²²

Pemikiran politik Ali Hasjmy semakin menarik diteliti mengingat perannya tidak hanya sebatas politisi, dosen, sastrawan. Tetapi, dirinya juga sebagai ulama kharismatik di Aceh. Sejarah telah membuktikan bahwa ulama Aceh di abad 16 dan akhir abad ke-19 M sangat berperan andil dalam berbagai aspek, baik aspek agama, budaya, ekonomi dan politik.²³ Hal ini terjadi karena pola pemahaman Islam bagi ulama Aceh pada masa itu bersifat menyeluruh (universal).²⁴ Pemahaman Islam yang seperti ini terbentuk karena ulama-ulama Aceh pada masa itu memaknai Islam dari berbagai aspek aktivitas sosial.

Fakta dari pola pemahaman Islam secara menyeluruh tersebut dapat dipahami ketika ulama Aceh yang terhimpun dalam organisasi yang disebut PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Pengaruh PUSA terhadap masyarakat Aceh tidak hanya berkaitan dengan permasalahan keagamaan yang bersifat tauhid, fiqih dan tasawuf, melainkan PUSA juga turut andil dalam pergerakan melawan

²²Ali Hasjmy, *Di Manakah Letak Negara Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional Singapura, 1970), hlm. 23

²³Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M. Hasbi Amiruddin, *Ulama, Separatisme dan Radikalisme di Aceh*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm.74

²⁴Muhammad Thalal, dkk. *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Aceh mandiri, 2010), hlm.11

penjajah, perkembangan pendidikan, politik dan ekonomi Aceh.²⁵ Eksistensi PUSA tidak dapat dilepaskan dari gagasan pemikiran politik di Aceh dewasa itu. Alasannya bahwa pergerakan PUSA merupakan salah satu prototipe organisasi di Aceh yang paling dekat dengan nilai-nilai keislaman.²⁶ Pemikiran politik Ali Hasjmy juga dipengaruhi oleh ulama-ulama yang terhimpun dalam PUSA, tidak hanya itu, Ali Hasjmy pada masa remajanya pernah menjadi bagian dari PUSA dengan sebagai pemuda PUSA.²⁷

Atas dasar interpretasi di atas, penulis berusaha untuk menelusuri pemikiran politik Ali Hasjmy dengan fokus menguraikan konsespsinya tentang negara Islam. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Ali Hasjmy merupakan sosok cendekiawan yang produktif dalam setiap disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu pendidikan, seni budaya, politik hingga jurnalistik. Permasalahan yang ingin ditelusuri berkaitan dengan konsep pemikiran politik Ali Hasjmy belum terpetakan secara jelas. Artinya bahwa gagasan politik Ali Hassjmy telah lama berkembang, namun penerapan politiknya sangat sulit diketahui oleh khalayak, khususnya di Aceh. Tidak hanya itu, pemikiran politiknya pun belum begitu komprehensif dipahami melalui perspektif kajian sosial dan politik. Pemikiran politiknya terkesan belum begitu banyak para akademisi yang mendalaminya secara serius. Akibatnya, kepribadian Ali Hasjmy cenderung diidentikkan dengan seorang sastrawan, padahal dirinya memiliki keistimewaan lainnya, yakni sebagai politikus atau negarawan.

Berangkat dari perspektif sejarah Aceh, pemikiran politik Ali Hasjmy sulit dipisahkan dengan proses perkembangan pendidikan di Aceh, hal ini dapat dilihat dari argumen masyarakat Aceh secara umumnya menyatakan bahwa Ali Hasjmy adalah seorang tokoh yang perlu dijadikan inspirator dalam melestarikan sejarah dan pendidikan di Aceh. Dengan perspektif sejarah ini senantiasa akan menampilkan konsep pemikiran Ali Hasjmy sebagai mana mestinya. Istilah negara Islam yang dikembangkan oleh Ali Hasjmy justru mengundang banyak pertanyaan yang harus dijawab dan diklarifikasikan. Hal ini menjadi penting karena implikasi dari istilah negara Islam tersebut dapat merubah pola ideologi masyarakat yang stabil menjadi sangat anarkis. Istilah ini tentunya akan melihat beberapa perspektif, yakni perspektif teks dan konteks dari proses munculnya pemikiran politik Ali Hasjmy.

²⁵Ali Hasjmy, *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.156

²⁶Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Bereueh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, cet.II, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), hlm.10

²⁷Ali Hasjmy, *Semangat Merdeka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.90

Tentunya konsep pemikiran politik Ali Hasjmy dapat memunculkan tema-tema lain yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini akan dibatasi oleh periodisasi mulai pada tahun 1941-2016 M. Tentunya kajian ini hanya fokus membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembentukan konsep pemikiran Ali Hasjmy dalam mengedepankan kajian konsep negara Islam beserta implikasi pemikirannya terhadap perkembangan keagamaan dan politik di Aceh dewasa ini. Berkaitan dengan Ali Hasjmy, buku yang berjudul “*Tokoh dan Pemimpin Agama*”, Aslam Nur menulis tentang kiprah-kiprah Ali Hasjmy dalam membentuk peradaban Aceh.²⁸ Buku tersebut menjelaskan tentang peran Ali Hasjmy di bidang Pendidikan, birokrasi, keagamaan dalam membangun martabat Aceh di kancah internasional. Berkaitan dengan tulisan yang akan diteliti, penulis berusaha fokus pada kajian pemikiran politik Ali Hasjmy terhadap pendeskripsian yang di tulis oleh Aslam Nur.

Seiring dengan tulisan yang ditulis oleh Badruzzaman Ismail beserta koleganya yang berjudul “*A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan: Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia*” banyak menjelaskan kesuksesan-kesuksesan yang telah dicapai oleh Ali Hasjmy dalam membangun Aceh, baik secara fisik maupun non fisik.²⁹ Tetapi, buku tersebut tidak membahas tentang pemikiran politik Ali Hasjmy secara komprehensif.

Berangkat dari tulisan yang ditulis oleh kelompok Badruzzaman Ismail tersebut, penulis dapat mengambil informasi-informasi tentang pemikiran politik Ali Hasjmy dan tentunya penelitian yang akan diteliti fokus untuk mengkonsepsikan dan menganalisis pemikiran politik Ali Hasjmy dalam perspektif pemikiran dalam Islam. Tentunya kajian ini akan tidak lepas dari kajian kepustakaan dalam menukan basis data penelitian ini. Sebuah penelitian yang baik harus memiliki teori penelitian yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti, sehingga alur penelitian tersebut mudah dipahami.³⁰ Berdasarkan teori tentang kenegaraan Islam yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa suatu negara harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis yang dipahami melalui pendekatan argumentasi rasional untuk mencapai kebenaran yang bersifat universal.³¹

²⁸Azzumardi Azra, ed. *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial- Intelektual*, (Jakarta: PPIM, 1998), hlm.361

²⁹Badruzzaman Ismail, dkk, *A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan: Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 191

³⁰Bahdin Nur Tanjung, Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005), hlm.168

³¹Khalid Ibrahim Jiddan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm.55

Berbeda halnya teori yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman yang menjelaskan bahwa negara Islam merupakan sebuah penerapan hukum-hukum Islam terhadap proses kenegaraan yang dilaksanakan secara substansial tanpa dimaknai secara simbolik.³² Seiring dengan argumen di atas, Socrates dalam karyanya menjelaskan tentang sebuah negara bahwa negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan pribadinya, akan tetapi negara merupakan susunan yang bersifat objektif.³³ Maksud dari argumen tersebut ingin menyampaikan bahwa negara merupakan sebuah wujud yang muncul dari proses kesepakatan bersama tanpa ada intimidasi dari pihak manapun.

Lain halnya dengan argumen Muhammad Natsir yang menjelaskan bahwa negara merupakan alat untuk mewujudkan hukum-hukum Islam.³⁴ Argumen Muhammad Natsir tersebut cenderung ditekankan pada penerapannya dan bukan dari penyebutannya, sehingga negara Islam tersebut hanya dapat dipahami dari sisi penerapannya.³⁵ Menurut Nurcholish Madjid, mengenai sikap umat muslim dalam melakukan pembaharuan baik itu hal yang berhubungan dengan konsep negara Islam maupun yang lainnya, urgensi negara Islam harus menampilkan bahwa konsep kualitas lebih penting dari pada kuantitas.³⁶ Kualitas yang dimaksud oleh Nurcholish Madjid merupakan nilai substansial penerapan yang terkandung dalam sistem kenegaraan dan bukan mengedepankan bentuk simbolik istilah sebuah negara. Nurcholish Madjid juga menyinggung bahwa wacana negara Islam hanya sebagai wacana politik modern pasca pembebasan negara yang dilakukan umat muslim di Pakistan.

Muhammad Dhiauddin Rais menjelaskan bahwa teori politik Islam sejatinya dapat dipahami melalui sistem politik yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika membentuk sistem negara di Madinah yang dalam penerapannya secara jelas hubungan agama dan negara saling berinteraksi dan sulit untuk dipisahkan.³⁷ Sejatinya diskursus pemicu perkembangan wacana tentang konsep negara Islam mulai disebarluaskan pada abad ke 20 sebagai upaya menggali

³²M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press 2006), hlm.53

³³Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.1

³⁴M. Natsir, *Capita Selecta*, (Bulan Bintang, 1079), hlm.491

³⁵Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Murai Kencana, 2004), hlm.86

³⁶Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, cet.XI*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.205

³⁷M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.4

taradisi dalam Islam yang dirujuk pada masa Abbasiyah, karena kejaayaan dan umat muslim ingin itu kembali.³⁸

Begitu juga dengan teori tentang negara Islam yang dikembangkan oleh Husain Haikal menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar terbentuknya negara Islam berangkat dari tiga nilai, yakni nilai keimanan, *sunnatullah* dan persamaan antar umat manusia.³⁹ Husain Haikal menegaskan bahwa di dalam Islam tidak terdapat bentuk pemerintahan atau negara yang baku, melainkan pemerintah dan negara tersebut terbentuk dari faktor agama, sosio-historisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kritis tentang karya-karya Ali Hasjmy. Studi kritis tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, menerapkan kajian hermeneutik dan epistemologi dalam menganalisis data penelitian. Kajian hermeneutik ini berperan penting dalam menganalisis teks-teks yang terdapat pada sumber data penelitian, yakni karya-karya Ali Hasjmy. Sedangkan kajian epistemologi berperan dalam menemukan konsep baru dari temuan kajian hermeneutik, sehingga hasil dari temuan epistemologi tersebut merupakan kelanjutan dari temuan hermeneutik yang peneliti lakukan.

Proses pencocokan kajian hermeneutik dan epistemologi dalam tesis ini akan membentuk sebuah metodologi analisis dalam mencari, menguraikan dan mengonsepsikan hasil penelitian yang terdapat dalam sumber data, sehingga posisi kajian hermeneutik dalam tesis ini terletak pada proses memaknai pembuat teks, pembaca teks dan teks itu sendiri yang terhimpun pada sumber data penelitian.⁴⁰ Posisi epistemologinya terletak pada temuan baru yang terdapat dalam tesis ini, dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan hermeneutik dan epistemologi dalam kajian ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Kedua, melakukan komparasi pemikiran Ali Hasjmy dengan hasil pemikiran tokoh-tokoh lain yang membicarakan tentang konsep negara Islam. *Ketiga*, menelusuri hubungan yang mempengaruhi munculnya konsep negara Islam perspektif Ali Hasjmy, baik dari sisi pengaruh keluarga, mitra kerja, pekerjaan maupun gaya hidup. *Keempat*, memetakan alur pemikiran politik Ali Hasjmy secara epistemologi dan melakukan proses kontekstualisasi beserta kritik terhadap wacana-wacana politik Aceh dewasa ini.

³⁸Dale F. Eickelman, James Piscatori, *Politik Muslim*, terj. M. Rahman (Bandung: Mizan, 1998), hlm.43

³⁹Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.10

⁴⁰Laode M. Kamaluddin, ed. *On Islamic Civilization*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2010), hlm.527

B. Pembahasan

1. Riwayat Hidup Ali Hasjmy

Ali Hasjmy merupakan salah satu generasi Aceh yang telah terbukti memberikan dampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kualitas perjuangannya dapat diukur dari usaha-usahanya sejak remaja hingga dewasa. Tepat tanggal 28 Maret 1914 di Aceh Besar, Ali Hasjmy dilahirkan dari pasangan Teungku Basyim dengan Cut Buleun, dengan dua saudara kandung, dua saudara kandung tersebut telah meninggal dunia sekitar umur tujuh bulan.⁴¹ Waktu Ali Hasjmy masih usia kanak-kanak, ibu kandungnya kembali ke pangkuan ilahi, sehingga dirinya dari kecil hingga remaja dalam status yatim.⁴² Ali Hasjmy memiliki sepuluh saudara dari dua orang ibu yang bernama Syarifah dan Cut Buleun, Dirinya merupakan anak tertua dari sepuluh bersaudara, dan dua di antaranya adalah saudara kandungnya.⁴³ Ali Hasjmy dikenal sebagai sosok yang sangat empati terhadap seluruh saudara-saudaranya, hal ini terbukti melalui beberapa pesan yang terdapat pada beberapa karyanya tulisnya.

Ayah Ali Hasjmy bekerja sebagai pedagang kain yang berdagang secara berpindah-pindah. Dari itu, Ali Hasjmy sejak kecil telah diasuh oleh neneknya yang lebih akrab disebut dengan sebutan *Nyak Puteh* (ibu dari ibu kandung Ali Hasjmy).⁴⁴ Dalam proses asuhan bersama neneknya tersebut, Ali Hasjmy sering mendapat pemahaman-pemahaman spirit perjuangan yang diajarkan oleh neneknya melalui pendekatan cerita dan syair.⁴⁵ Karakter kepemimpinannya juga dipengaruhi oleh pola asuhan melalui substansi dari syair yang diucapkan oleh neneknya tersebut. Menjelang usia muda, Ali Hasjmy aktif menciptakan karya tulis, baik berbentuk puisi, novel yang cenderung dipublikasi oleh berbagai media cetak di nusantara. Dalam proses publikasi karya tersebut. Sejatinya nama lengkap Ali Hasjmy adalah Muhammad Ali Hasjim, tetapi dalam beberapa karya-karya romannya yang terbit sekitar tahun 1930 M. Ali Hasjmy sering menggunakan nama samaran, di antara nama-nama yang sering digunakannya adalah Al-Hariry, Aria Handiningsum, dan Asmara Hakiki.⁴⁶ Fenomena ini dipandang lazim oleh seniman atau sastrawan, karena upaya untuk menciptakan nama samaran tersebut

⁴¹H.A Ghazaly, *Biografi Teungku H. Ali Hasjmy*, (Jakarta: SOCILIA, 1978), hlm.3

⁴²Rusdi Sufi, Agus Bidi Wibowo, *Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 114

⁴³Ali Hasjmy, *Semangat Kemerdekaan dalam Sajak Indonesia Baru*, (Banda Aceh: Pustaka Putro Canden, 1963), hlm.70

⁴⁴Ali Hasjmy, *Seorang Wanita Telah Membina Kepribadian Ali Hasjmy Sejak Dini*, (Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1993), hlm.2

⁴⁵Ali Hasjmy, *Semangat Merdeka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.31

⁴⁶Ameer Hamzah, "In Memoriam A. Hasjmy", dalam Majalah Santunan, no. 235 Tahun 199, hlm.8

merupakan bagian dari metode dalam mempublikasikan karya dalam bentuk roman. Dari beberapa nama tersebut, dirinya tetap dipanggil dengan nama Ali Hasjmy.

Pengalaman pendidikan yang dialami oleh Ali Hasjmy sangat baik dijadikan sebagai pembelajaran bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alasannya, Ali Hasjmy tidak hanya belajar di lembaga pendidikan formal, tetapi dirinya juga belajar di lembaga pendidikan non formal. Dirinya telah membuktikan bahwa hasil dari kedua lembaga pendidikan yang dijalannya tersebut dapat dirasakan oleh beberapa lapisan masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik darinya. Implikasi dari itu, dapat dipahami bahwa kecerdasan Ali Hasjmy bukanlah tipe kecerdasan yang bersifat menara gading.⁴⁷ Tapi Ali Hasjmy mampu mewujudkan gagasannya ke dalam bentuk kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi Aceh.

Ali Hasjmy adalah salah satu warga Aceh yang sempat mengikuti pendidikan formal Hindia Belanda yang bernama *Government Inlandsche School Montasie* yang bertempat di Banda Aceh (Kuta Radja). Dalam situasi sosial, politik dan keagamaan di Aceh pada saat itu, Masyarakat Aceh khususnya menganjurkan generasinya agar tidak masuk ke sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Lain halnya dengan Ali Hasjmy, selain mendapat dukungan dari keluarga besarnya, Ali Hasjmy dengan niat yang tulus mencari ilmu pengetahuan yang luas.⁴⁸ Ali Hasjmy berani bersekolah di Sekolah Hindia Belanda tersebut. Walaupun tekanan mental dari masyarakat pada masa itu cukup berat bagi dirinya.

Setelah selesai menempuh pendidikan di *Government Inlandsche School Montasie*, Ali Hasjmy melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di Sumatra Thawalib, dan dilanjutkan di perguruan tinggi *al-Jami'ah al-Qism Adabul Lughah wa Tarikh al-Islamiyyah* (Perguruan Tinggi Islam Jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam) di Sumatra Barat, yang pada saat itu, lembaga tersebut dipimpin oleh Mahmud Yunus pada tahun 1950.⁴⁹ Tempat inilah Ali Hasjmy memperoleh pemahaman dan cara pandang yang berbeda dari pendidikan yang dijalani sebelumnya ketika berada di Aceh.

Pendidikan Ali Hasjmy di Aceh berorientasi dari pola-pola berlandaskan kurikulum yang diproduksi oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tiba di Sumatra

⁴⁷Ali Hasjmy, *Pemimpin dan Akhlaknya*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1973), hlm. 131

⁴⁸Ali Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Islam*, (Banda Aceh: Lembaga Penerbit IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1969), hlm.33

⁴⁹Azyumardi Azra, ed. *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998), hlm 359

Barat, Ali Hasjmy telah terkoneksi dengan pola-pola pendidikan yang berasal dari Timur tengah, sehingga orientasi pendidikannya bercorak pada pembaharuan yang digagas oleh Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Pasca menuntut ilmu pengetahuan di Sumatra Barat Ali Hasjmy merasa terpanggil untuk pulang ke Aceh seiring dengan dinamika politik dan keagamaan yang melanda Aceh. Dengan modal pendidikan strata satu (S-1), Ali Hasjmy telah mampu berkolaborasi dengan para *stake holders* di Aceh untuk membangun sumber daya manusia di Aceh.⁵⁰ Keterampilan multi talenta Ali Hasjmy bukan muncul setelah pulang dari Sumatera Barat, tetapi telah tumbuh dalam jiwanya sejak menempuh usia remaja ketika dirinya ikut berpartisipasi dengan para ulama-ulama Aceh dalam menghadapi kolonial Hindia Belanda.

2. Epistemologi Negara Islam

Kajian epistemologi selalu berkaitan dengan segala objek ilmu pengetahuan di alam raya ini. Objek tersebut baik berbentuk objek formal maupun objek material.⁵¹ Fakta ini membuat beberapa pendapat yang salah paham tentang kajian epistemologi. Sehingga epistemologi dianggap sebuah kajian yang berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lainnya.⁵² Idealnya, nilai-nilai epistemologi tidak dapat dilepaskan dari semua disiplin ilmu pengetahuan. Karena epistemologi merupakan substansi ilmu pengetahuan itu sendiri. Tidak satu ilmu pengetahuanpun yang tidak memiliki nilai epistemologi.

Argumentasi di atas sesuai dengan pengertian epistemologi dalam perspektif Dagober D. Runes yang menyebutkan bahwa “*epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge*”.⁵³ Pengertian sederhananya menjelaskan bahwa kajian epistemologi mengadung nilai asal-usul, metode, struktur, dan kevaliditas. Dengan demikian, nihil rasanya ketika suatu konsepsi terlepas dari kajian epistemologi.

Benar bahwa epistemologi bagian dari cabang filsafat, dan filsafat merupakan induk dari segala disiplin ilmu, baik ilmu agama, politik, budaya maupun ekonomi. Cabang filsafat (*hikmah*) secara umum terbagi dalam tiga bagian yaitu, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Berkaitan dengan epistemologi, beberapa

⁵⁰Ali Hasjmy, *Mimpi-Mimpi Indah di Rumah Sakit MMC*, (Banda Aceh: Gua Hira', 1993), hlm.71

⁵¹Muhammad Baqir ash-Shadr, *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir ash-Shadr terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, terj. M.Nur Mufid bin Ali, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 24

⁵²Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral dan Politik*, (Gramedia: Jakarta, 1986), hlm.302

⁵³Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy*, (Totowa New Jersey: Adam & Co, 1971), hlm.94

tokoh mengklasifikasikan epistemologi menjadi tiga pembagian yaitu, epistemologi Islam, epistemologi Yunani dan epistemologi barat.

a. Asal-usul

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, konsep negara Islam yang digagas oleh Ali Hasjmy berangkat dari pemikiran politik Ali Hasjmy yang bercorak teologis interkonektif.⁵⁴ Pemikiran tersebut sering disampaikan melalui beberapa karyanya. Secara tekstual, titik awal munculnya ide tentang negara Islam oleh Ali Hasjmy berangkat dari pengakuannya yang tertuang dalam salah satu tulisannya sebagai berikut.

“... salah satu segi dari kebudayaan Islam, yaitu masalah yang berhubungan dengan ketata-negaraan Islam pada umumnya, dan dasar-dasar negara Islam pada khususnya, di samping masalah-masalah ekonomi, sosial, pendidikan ilmu pengetahuan dan kesenian dalam Islam. Membahas masalah kebudayaan Islam berarti membahas alam fikiran Islam, alam perasaan Islam dan alam cita Islam, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial. Karena itu, memberi ceramah atau kuliah tentang kebudayaan Islam berarti mengajarkan dasar-dasar negara Islam yang meliputi politik, ekonomi, dan sosial, berarti membahas kehidupan politik Islam, kehidupan ekonomi Islam dan kehidupan sosial Islam. Kalau kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, berarti mempelajari sejarah pertumbuhan dan perkembangan politik, ekonomi dan sosial, berarti mempelajari sejarah bangun dan jatuhnya negara Islam dalam segala bidang.

Berdasarkan tulisan Ali Hasjmy di atas, dapat dipahami bahwa Ali Hasjmy mencoba mentransformasikan pemikiran politiknya kepada publik. Sisi lainnya, Ali Hasjmy secara tidak langsung ingin mempengaruhi cara pandang politik masyarakat, baik melalui karya maupun jabatannya. Penulis menemukan dalam beberapa karya Ali Hasjmy, terdapat lima sebab asal-usul munculnya karya dan pemikiran tentang negara Islam, yakni:

- a. Permintaan dan keinginan publik di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Kurangnya bacaan dalam bahasa Melayu dan Indonesia tentang diskursus negara Islam yang ditulis para cendekiawan muslim.
- c. Mendokumentasikan naskah ceramah yang tertuang dari pemikiran politik Ali Hasjmy.
- d. Permintaan dari para guru, dosen dan mahasiswa
- e. Mengembangkan paradigma politik, ekonomi, agama, pasca Ali Hasjmy mengisi perkuliahan di Malaysia dan Singapura.

⁵⁴Wildan, *Nasionalisme dan Sastra: Doktrin, Misi, dan Teknik Penyampaian Nasionalisme dalam Novel Ali Hasjmy*, (Banda Aceh: Ceuci, 2011), hlm.138

Tentunya lima asal-usul yang bersifat simbolik di atas bukan menjadi faktor utama munculnya pemikiran politik Ali Hasjmy. Sebuah pemikiran politik seorang tokoh tidak mungkin dipengaruhi oleh faktor yang tunggal.⁵⁵ Artinya bahwa upaya Ali Hasjmy dalam mengonsepsikan negara Islam juga dipengaruhi oleh kualitas kesadaran dan pengalamannya dalam menjalani aktivitas kehidupan beragama, sosial dan politik di lingkungannya.

b. Sumber

Setiap pemikiran pasti dipengaruhi oleh berbagai sumber munculnya pemikiran tersebut. Dalam konteks pemikiran politik Ali Hasjmy, terdapat beberapa sumber yang telah merekonstruksi pemikiran Ali Hasjmy. Sumber tersebut penulis klasifikasikan menjadi tiga yakni, Al-Quran dan karya tokoh-tokoh pemikiran Islam

3. Jaringan dan kemitraan politik Ali Hasjmy

Karir politik Ali Hasjmy terus meningkat setelah Ali Hasjmy mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuannya dengan situasi keagamaan, sosial politik di Indonesia.⁵⁶ Dalam konteks ini, penulis menemukan bahwa kecerdasan politik Ali Hasjmy muncul dari sikap responsifnya dalam menyikapi dinamika perpolitikan di Indonesia.⁵⁷ Tentunya tokoh-tokoh yang mempengaruhi Ali Hasjmy secara fisik, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh lokal pula.⁵⁸ Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Ali Hasjmy adalah seorang tokoh yang besar dari lokal tetapi memiliki kualitas internasional.⁵⁹ Artinya bahwa Ali Hasjmy mampu menstranformasikan segala gagasannya dalam menyelesaikan dinamika bangsa Indonesia secara independen tanpa diintervensi oleh penguasa manapun.

Salah satu ciri khas pergerakan politik Ali Hasjmy di antaranya adalah bersifat substantif, artinya bahwa dalam permasalahan politik, peran ulama dan politisi saling berhubungan layaknya pinang dibelah dua. Tanggung jawab politik tidak hanya dibebankan oleh satu kelompok masyarakat semata, melainkan semua level masyarakat harus merasakan tanggung jawab yang sama dalam membangun martabat manusia melalui politik yang disinari ajaran.⁶⁰ Implikasi dari

⁵⁵Ali Hasjmy, *Surat-Surat dari Tanah Suci*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm.60

⁵⁶Ali Hasjmy, *Tanah Merah: Bumi Pahlawan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.2

⁵⁷Ali Hasjmy, *Aceh dan Pahang*, (Banda Aeh: Lemabaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 1989), hlm.41

⁵⁸Ameer Hamzah, *Mutiara (Kalam) Hikmah Prof. H. Ali Hasjmy*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 8

⁵⁹Ali Hasjmy, *Risalah Akhlak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm.43

⁶⁰Ali Hasjmy, *Peran Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.69

pemahaman politik seperti ini merupakan salah ciri khas pemikiran politik Ali Hasjmy.

Situasi politik di Aceh baik masa Ali Hasjmy maupun pra Ali Hasjmy, ulama berperan sebagai *multi solution* dalam membangun cita-cita masyarakat. Ulama tidak hanya berkiprah dari mimbar-mimbar jum'at semata, tetapi ulama juga turut serta dalam pergerakan politik, militer, ekonomi dan kebudayaan.⁶¹ Penulis menemukan tipologi pergerakan politik Ali Hasjmy sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh ulama Aceh sebagai berikut.⁶²

4. Metode perwujudan negara Islam

Berbagai strategi politik yang telah dilakukan oleh Ali Hasjmy merupakan salah satu bagian dari pengalaman hidupnya. Aktivitas multi fungsi yang dilakukan oleh Ali Hasjmy, baik sebagai pendakwah, politisi, pejuang hingga sastrawan.⁶³ Bekal multi talenta tersebut, Ali Hasjmy mampu mengaplikasikan gagasannya ke dalam sistem pemerintahan ketika dirinya menjabat sebagai gubernur Aceh periode 1960-1964. Penulis menganalisis melalui beberapa karyanya tentang negara Islam menemukan bahwa metode perwujudan negara Islam yang dikonsepsikan Ali Hasjmy merupakan upaya untuk mensinergikan nilai-nilai keislaman ke dalam sistem kenegaraan.⁶⁴ Ali Hasjmy tetap yakin bahwa tidak ada satu sisi sistem negara yang tidak dapat menerima nilai universalitas yang terdapat dalam Islam.

Upaya untuk mewujudkan negara Islam, secara tidak langsung Ali Hasjmy menginginkan bahwa para pemimpin-pemimpin yang berada dalam sistem pemerintahan harus mampu memaknai kekuasaan Allah Swt dalam perspektif pemikiran politik. Sehingga dalam setiap kebijakan politik, para pemimpin tersebut tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt.⁶⁵ Upaya untuk mewujudkan negara Islam, Ali Hasjmy menggunakan bentuk simbolik sebagai instrumen. Instrumen tersebut tampak jelas ketika Ali Hasjmy mengeluarkan pendapat bahwa negara Islam wajib untuk diterapkan. Walaupun secara tidak langsung Ali Hasjmy meyakini bahwa negara Islam tersebut hanya

⁶¹Ali Hasjmy, "*Persatuan dan Keamanan Syarat Mutlak bagi Kelanjutan Pembangunan*", dalam Naskah Khutbah Sholat Idul Adha, di Sabang, 23 Juni 1991, hlm.1

⁶²Ali Hasjmy, *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pengembangan Tamadun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.231

⁶³Ali Hasjmy, *Apa Tugas Sastrawan sebagai Khalifah Allah*, (Surabaya: Bina Ilmu,1987), hlm.90

⁶⁴Ali Hasjmy, *Dakwah Islamiyah dan Kaitan dengan Pembangunan Manusia*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 19976), hlm.30

⁶⁵Ali Hasjmy, *Surat-Surat dari Penjara*, (Bulan Bintang: 1976), hlm.93

ada dalam bentuk nilai-nilai yang diaplikasikan ke dalam sistem pemerintahan. Validitas (Keabsahan)

Instrumen yang digunakan untuk menemukan nilai validitas pemikiran politik Ali Hasjmy adalah melalui integrasi antara kesesuaian pemikiran politik Ali Hasjmy dengan perilaku politiknya ketika menjabat sebagai gubernur Aceh. Contoh, secara teoritis, Ali Hasjmy sangat menjunjung tinggi nilai dakwah dalam Islam. pemahaman yang sedemikian ditransformasikan ke dalam perilaku Ali Hasjmy yang menyakini bahwa berpolitik dan menolong sesama umat juga bagian dari dakwah.⁶⁶ Kerangka pikir yang sedemikian sangat menentukan kualitas keabsahan (validitas) pemikiran politik Ali Hasjmy.

Kesadaran beragama dan pengalaman beragama Ali Hasjmy sangat menentukan kualitas pemikiran politiknya.⁶⁷ Hal inilah yang menciptakan nilai independensi tumbuh dalam karakter kepemimpinannya. Kualitas independensi tersebut dapat dipahami melalui manajemen politik Ali Hasjmy yang dianggap efektif dan efisien dalam menangani permasalahan konflik Darul Islam (DI), Misi Hardi, dan proses negosiasi pembagunan KOPELMA yang pada masa itu hubungan Aceh dengan pemerintah pusat masih belum stabil.⁶⁸

Berbagai kebijakan politik Ali Hasjmy baik menjabat sebagai gubernur, rektor maupun pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Aceh, cenderung sesuai dengan interpretasi yang tertuang dalam beberapa karya yang menjelaskan tentang politik.⁶⁹ Berdasarkan kesesuaian antara konsepsi dan praktek yang dilakukan Ali Hasjmy, penulis menganggap bahwa pemikiran politik Ali Hasjmy dalam mengonsepsikan negara Islam dianggap valid tanpa terdapat nilai yang bersifat utopis.

5. Alur Konsepsi Politik Ali Hasjmy

Ali Hasjmy tidak hanya dikenal sebagai politisi, dosen, sastrawan, penulis, novelis, jurnalis, dan pejabat. Tetapi Ali Hasjmy juga dikategorikan sebagai ulama bagi warga negara republik Indonesia. Kiprah Ali Hasjmy sangat berpengaruh di daerah Aceh, hal ini terjadi karena Ali Hasjmy memiliki multi

⁶⁶Ali Hasjmy, *Pokok-Pokok Pemikiran Dakwah Islamiyah: Sebuah Tinjauan tentang Sifat, Sasaran dan Cara Pelaksanaan Dakwah*, (Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1997), hlm.23

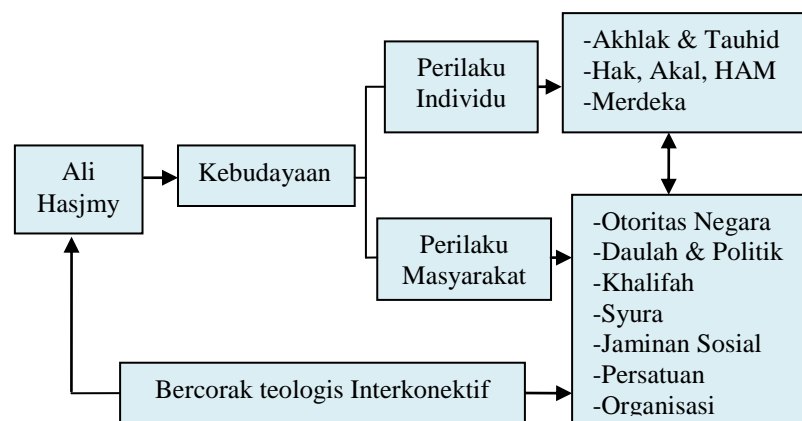
⁶⁷Ali Hasjmy, *Cahaya Terbenam*, (Singapura: Saw Tocs, 1976), hlm.78

⁶⁸Hardi, *Daerah Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa depannya*, (Jakarta: Cita Pauca Serangkai, 1993), hlm.150

⁶⁹Ali Hasjmy, *80 Tahun Melalui Jalan Raya Dunia*, (Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1993), hlm.5

kemampuan yang berkaitan dengan agama, budaya, dan politik.⁷⁰ Ali Hasjmy pernah berperan pada posisi-posisi yang strategis. Selain pernah menjabat sebagai rektor pada salah satu perguruan tinggi Islam (IAIN Ar-Raniry), dirinya juga pernah menjabat sebagai gubernur Daerah Istimewa Aceh.⁷¹ Jabatan-jabatan strategis tersebut digunakannya sebagai kendaraan politik untuk menyesuaikan pemahamannya tentang Islam ke dalam sistem pemerintahan. Atas dasar ini, gagasan tentang negara Islam yang ditawarkan Ali Hasjmy penting untuk dipertimbangkan oleh dunia.

Tentu saja latar belakang pendidikan Ali Hasjmy sangat mempengaruhi pola pemikirannya. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, Ali Hasjmy menempuh pendidikan yang berkaitan dengan kebudayaan dalam Islam di perguruan tinggi Islam jurusan sastra dan kebudayaan Islam di Sumatra Barat, tentunya kajian kebudayaan dalam Islam tersebut bersifat dinamis.⁷² Penulis mencoba untuk membuat konfigurasi dari corak pemikiran politik Ali Hasjmy sebagai berikut.



Berdasarkan konfigurasi dari corak pemikiran Ali Hasjmy di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemikirannya bersifat integrasi teologis. Alasannya bahwa Ali Hasjmy ketika mengonsepsikan negara Islam, Ali Hasjmy cenderung memahaminya secara menyeluruh dan saling mengkonfirmasi antara disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu lainnya.⁷³ Misalnya, konsep negara Islam yang tercantum dalam karya Ali Hasjmy yang berjudul “*Dimana Letak Negara Islam*” dan “*Dasar -Dasar Negara Islam*”, dalam tulisan tersebut secara tidak langsung

⁷⁰Ali Hasjmy, dkk, *Asmara dalam Pelukan Pelangi*, (Banda Aceh: Yayasan & Ali Hasjmy, 1963), hlm.16

⁷¹Sirajuddin, *Pergulatan Konsep Kenegaraan di Aceh: Studi Pemikiran A. Hasjmy*, (Jakarta: Studio Press, 2005), hlm.21

⁷²Ali Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi Tanah Aceh*, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), hlm.10

⁷³Ali Hasjmy, *Di mana Letak Negara Islam*, (Singapura: Shing Loong Press, 1970), hlm.23

nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal tersampaikan melalui corak pemikiran politiknya tentang negara Islam.⁷⁴ Ketika Ali Hasjmy menganalisis dan mengonsepsikan negara Islam, argumentasi-argumentasi yang muncul selalu berangkat dari paradigma yang multi disipliner dan saling terhubung.

Prakonsepsi tentang negara Islam muncul dalam benak Ali Hasjmy seiring dengan perkembangan pemahamannya tentang kebudayaan Islam yang bersifat universal. Menurut Ali Hasjmy, untuk memahami studi kebudayaan Islam, secara otomatis melakukan konfirmasi terhadap studi-studi ilmu lain, seperti studi tentang agama, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan pola pemahaman studi yang sedemikian, Ali Hasjmy merasa berkewajiban untuk merumuskan konsep tentang negara Islam.

Banyak nilai yang terkandung di dalam studi kebudayaan Islam, sehingga Ali Hasjmy menegaskan dalam tulisannya bahwa studi kebudayaan Islam sama halnya dengan pemikiran dalam Islam. Untuk itu, butuh strategi yang efektif untuk menyampaikan cara pandang tentang studi kebudayaan Islam yang sedemikian. Rangkaian argumentasi di atas menyampaikan bahwa potensi interkoneksi semua disiplin ilmu pengetahuan terdapat dalam proses terbentuknya konsep negara Islam perspektif Ali Hasjmy.

Ali Hasjmy menegaskan bahwa adanya negara merupakan sebuah kewajiban. Alasannya bahwa dalam kehidupan setiap bangsa, pasti mengalami perubahan dalam menentukan nasib bangsanya sendiri. Sehingga upaya untuk memilih konsep ideal dalam suatu negara adalah suatu keniscayaan. Umat manusia bebas memilih dan memilah strategi apa yang digunakan untuk mencari pondasi awal dalam merumuskan konsep negara ideal menuju terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah tentang negara tidak serta-merta betumpu pada proses administrasi pemerintahan, tetapi peran landasan ideologi juga mengambil peran yang urgen ketika menjalankan suatu negara. Umat muslim diperbolehkan dalam menentukan bentuk-bentuk negara yang mereka inginkan, terlebih masing-masing negara di era modern saat ini sangat beragam bentuk negara ideal yang ditawarkan. Kenyataan, jika dipertanyakan kepada umat muslim, mereka cenderung memilih konsep negara yang berlandaskan politik Islam.

6. Corak Pemikiran Politik Ali Hasjmy

Prakonsepsi Ali Hasjmy tentang negara Islam berawal dari pemahamannya tentang sejarah umat manusia ketika Islam hadir di permukaan bumi ini. Dalam

⁷⁴Ali Hasjmy, *Semangat Merdeka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.34

peristiwa tersebut Ali Hasjmy menjelaskan bahwa umat manusia sedang terhegemoni dengan berbagai kerusakan, baik rusak yang bersifat hubungan dengan Tuhan, masyarakat, binatang dan alam.⁷⁵ Situasi tersebut membutuhkan tempat dan sistem yang baik untuk mengaturnya. Ali Hasjmy memahami bahwa Islam hadir pertama kalinya untuk memperbaiki aqidah dengan memastikan kekuasaan Allah Swt yang bersifat Universal. Ketika aqidah telah diperbaiki, maka berbagai konflik antar masyarakat secara bertahap akan berkurang.⁷⁶ Sehingga Islam dapat membimbing manusia ke arah yang penuh dengan keadilan dan kerja sama dalam mewujudkan kebahagiaan bagi umat manusia.⁷⁷

Ali Hasjmy menginterpretasi bahwa peran Islam dalam membangun *daulah* atau negara tidaklah bersifat utopis selama masyarakat mampu membangun negara yang berlandaskan dari nilai-nilai Islam yang bersifat universal.⁷⁸ Islam menjadikan manusia sebagai khalifah atau sebagai pemangku amanah Allah Swt untuk mengurus dan menjaga alam semesta beserta isinya, sedangkan negara dan kedaulatannya adalah milik Allah Swt. Dapat dipahami bahwa negara yang dibangun berdasarkan mandat dari Allah yang maha esa dalam menjaga segala ciptaannya, termasuk mewujudkan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Implikasi dari ini, dapat dipahami bahwa Ali Hasjmy ingin menegaskan bahwa membangun negara Islam merupakan bagian dari perintah Allah Swt.

Menurut Ali Hasjmy negara yang disebut sebagai negara Islam tersebut dibangun dari dua prinsip utama yakni prinsip ketauhidan dan prinsip *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan dalam Islam). Konsepsi tentang landasan utama tentang negara Islam berangkat dari pemahaman Ali Hasjmy terhadap Al-Quran seperti, surah *Ali Imran* (ayat 103-104). Perpaduan antara tauhid dan *ukhuwah Islamiyah* yang menjadi dasar negara Islam akan menjadikan agama dan negara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁷⁹ Salah satu tujuan negara Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia baik muslim maupun non muslim. Islam tidak hanya membahas sholat, ekonomi, politik dan perang, tetapi Islam juga membahas semua objek ilmu pengetahuan yang bertaburan di alam raya ini.⁸⁰

⁷⁵Ali Hasjmy, *Jembatan Selat Malaka, Aceh Pusat Peradaban Melayu*, (Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1997), hlm.363

⁷⁶Syamsul Rijal, *Dinamika Pemikiran Islam di Aceh: Membedah Toleransi Kearifan Lokal dan Kehidupan Sosial di Aceh*, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2011), hlm.51

⁷⁷Ali Hasjmy, *Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh, untuk Merebut Kemerdekaan Kembali*, (Banda Aceh: Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980), hlm.3

⁷⁸Ali Hasjmy, *Nabi Muhammad Saw sebagai Panglima Perang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm.3

⁷⁹Ali Hasjmy, *Misi Haji Menjalankan Tugas Revolusi di Negara-Negara Arab*, (Bandung: Al-Maarif, 1984), hlm.61

⁸⁰Syamsul Rijal, *Refleksi Sosiologis Masyarakat Modern*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2015), hlm.30

Atas dasar ini, maka sangat sulit untuk menamakan suatu agama tanpa politik atau politik tanpa negara bahkan negara tanpa agama. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, menurut Ali Hasjmy sebabnya sebagai berikut.

- a. Setiap yang berhubungan dengan aqidah dan ibadah adalah agama dan dapat disebut bahwa politik Islam dapat memperbaiki aqidah dan ibadah.
- b. Setiap yang bersangkutan dengan moral dan pendidikan adalah agama, dan dapat disebut bahwa politik Islam merupakan bagian dari pendidikan dan moral.
- c. Setiap yang berkaitan dengan nilai *muamalah* adalah agama, hal ini dapat disebut bahwa politik Islam bagian dari ekonomi dan kebudayaan.
- d. Setiap yang berhubungan dengan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat adalah agama, dan dapat disebut bahwa politik Islam bagian dari negara.

Demikianlah luasnya hubungan agama dan negara menurut ajaran Islam yang dipahami oleh Ali Hasjmy. Negara Islam tanpa agama tidak mungkin terjadi dan perwujudan agama Islam yang terlepas dari perpolitikan bukan dinamakan Islam.⁸¹ Islam menetapkan hukum sesuai dengan klasifikasinya, baik yang berkaitan dengan ekonomi, budaya maupun politik.⁸² Pola yang sedemikian menurut Ali Hasjmy bahwa Islam membangun undang-undangnya untuk memberikan pedoman manusia untuk menjalani kehidupan menuju akhirat.

7. Analisis Kontekstualisasi Pemikiran Politik Ali Hasjmy

Paradigma keilmuan Ali Hasjmy dalam upaya untuk mewujudkan negara Islam berlandaskan nilai-nilai keislaman. Ciri khusus paradigma tersebut secara tidak langsung mempengaruhi segala objek analisis yang dicerna oleh Ali Hasjmy. Pemikiran politik Ali Hasjmy tidak hanya sebatas rangkaian teori-teori yang bersifat argumentatif. Tetapi Ali Hasjmy telah menerjemahkan teori tentang negara Islam melalau strategi perwudan negara Islam sebagai berikut:

Pertama, menyadarkan masyarakat tentang pemahaman tauhid yang bersifat universal. Mustahil negara Islam dapat diterapkan pada masyarakat atau suatu negara tanpa adanya dukungan pengetahuan masyarakat dan birokrat tentang nilai ketauhidan yang bersifat universal. Sikap pesimis masyarakat cenderung menghantui ketika mendengarkan upaya untuk menerapkan negara Islam di permukaan bumi ini.

⁸¹Ali Hasjmy, *Sastra dan Agama*, (Banda Aceh: Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980), hlm.5

⁸²Ali Hasjmy, *Muktasar Kuliah tentang Publisistik*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwa IAIN Ar-Raniry, 1969), hlm.17

Kedua, persatuan umat di bawah otoritas negara Islam. Persatuan umat tidak dapat dilakukan dengan pendekatan ortodok dan mempertajam perbedaan antara sesama. Tetapi, Umat Islam hanya dapat disatukan berdasarkan pendekatan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.⁸³ Pemahaman ketauhidan yang bersifat universal sangat mendorong umat manusia untuk mampu menemukan nilai dalam setiap aktivitas kenegaraan baik yang bersifat praktis maupun teoritis. Otoritas negara Islam berada di bawah kedaulatan Allah swt yang ditransformasikan dalam nilai-nilai kedaulatan umat manusia.

Ketiga, perumusan kebijakan negara Islam. Seperti yang telah disampaikan di atas, dalam mengonsepsikan negara Islam, Ali Hasjmy tidak terjebak dalam paradigma yang simbolik tentang bentuk negara Islam. Pola gagasan yang sedemikian juga mempengaruhi pola perumusan kebijakan-kebijakan yang diproduksi dari negara Islam. Perumusan kebijakan tersebut berlandaskan nilai kemaslahatan dan kearifan yang membeku dalam produk-produk kebijakan negara tersebut, baik kebijakan yang bersifat politik maupun kebijakan yang bersifat ekonomi atau kebijakan-kebijakan lainnya.

Keempat, kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya negara Islam. Setelah beberapa tahapan di atas telah dipahami oleh para *stake holders* (pemangku kekuasaan) secara tidak langsung akan menciptakan keteladanan masyarakat sebagai warga negara. Artinya adalah negara Islam dapat menciptakan keteladanan publik layaknya keteladanan publik di masa Rasulullah Saw memimpin negara Madinah.⁸⁴ Dalam hal ini Ali Hasjmy bukanlah seorang pakar yang memiliki konsepsi politik yang utopis, tetapi Ali Hasjmy ada seorang pakar yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam mewujudkan negara Islam yang dikonsepsikannya tersebut. Menurut Ali Hasjmy, perwujudan gagasan negara Islam tersebut akan terwujud seiring dengan perubahan waktu, seiring dengan perkembangan ajaran Islam dalam memberikan solusi terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem negara.⁸⁵ Sehingga, apapun bentuk sistem negaranya, asalkan memiliki nilai-nilai keislaman universal, disitulah potensi perwujudan negara Islam akan terjadi

C. Penutup

Ali Hasjmy merupakan sosok kepribadian yang multi talenta. Artinya bahwa dirinya mampu mengembangkan berbagai potensi disiplin ilmu pengetahuan.

⁸³Ali Hasjmy, *Melalui Jalan Raya Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.51

⁸⁴Ali Hasjmy, *Nabi Muhammad sebagai Panglima Perang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.17

⁸⁵Ali Hasjmy, *Para Sahabat yang Gugur di Zaman Nabi*, cet,II, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), hlm.23

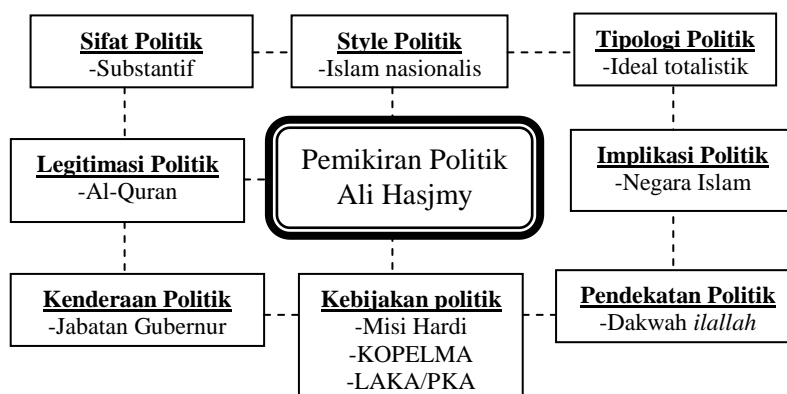
Kepribadian yang sedemikian, Ali Hasjmy banyak menjalankan aktivitas kehidupannya dengan banyak profesi, seperti pendakwah, politisi, jurnalis, dosen, budayawan dan sastrawan. Berbagai profesi tersebut dibekali dengan pemahaman kebudayaan Islam yang bersifat universal. Pemikiran politik Ali Hasjmy bercorak teologis interkoneksi, sehingga tidak terjebak dengan hal-hal yang bersifat simbolik (dogmatis).

Ali Hasjmy telah sukses membuka paradigma studi kebudayaan yang selama ini dianggap sempit. Kebudayaan tidak hanya berbicara tentang analisis sosial kultural, tetapi kebudayaan selalu beririsan dengan studi-studi spritualitas keislaman. Implikasi dari pola pikir yang sedemikian mengakibatkan Ali Hasjmy berani untuk mengonsepsikan teori politik tentang negara Islam. Negara Islam yang dimaksud oleh Ali Hasjmy adalah negara yang bersifat teologis dan mengadopsi nilai-nilai universal yang terkandung dalam Islam. Ali Hasjmy menegaskan bahwa negara Islam wajib ada di permukaan bumi.

Alasannya bahwa negara Islam pernah diberlakukan oleh Rasulullah Saw ketika memimpin negara di Madinah. Argumentasi Ali Hasjmy dalam mengonsepsikan dan menerapkan negara Islam berangkat dari pemahaman-pemahamannya melalui tulisan-tulisan para pembaharuan Islam, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Mawardi, Taha Husein dan beberapa tokoh lainnya. Hasil pemikiran Ali Hasjmy berbanding lurus dengan segala aktivitasnya dalam mencerdaskan rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat Aceh. Dengan berbagai prestasi yang diciptakan baik melalui kebijakan politik maupun pribadi, telah mendorong perbincangan politik di negara ini. Ali Hasjmy merupakan tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan sumber daya manusia, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hal itu terbukti melalui berbagai kebijakan-kebijakan politik ketika dirinya menjabat sebagai gubernur Aceh.

Nilai-nilai yang membentuk negara Islam menurut Ali Hasjmy adalah nilai tauhid, kemanusiaan, perekonomian, kebudayaan, dan politik Islam. nilai-nilai tersebut saling mempengaruhi antara nilai satu dengan nilai yang lainnya. Melalui nilai-nilai tersebut telah menciptakan kerangka berfikir yang universal dalam pemikiran politik Ali Hasjmy. Secara epistemologi, proses terbentuknya negara Islam Ali Hasjmy berawal dari pemahamannya tentang para pemimpin terdahulu (*khalifah*) ketika memahami Al-Quran secara menyeluruh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dapat mewarnai segala sistem yang terdapat pada negara. Alasannya bahwa negara merupakan media yang digunakan umat manusia dalam berinteraksi, baik interaksi antar sesama manusia maupun berinteraksi terhadap Allah Swt.

Ali Hasjmy menegaskan bahwa negara Islam adalah negara yang mengadopsi pemahaman Islam secara menyeluruh. Bentuk negara Islam dapat dipahami dari sisi kesesuaian antara nilai keuniversalan ajaran Islam dengan kebijakan suatu negara. Dalam hal ini tidak terdapat batas akhir dalam menentukan bentuk negara Islam, karena Islam terus berkembang dalam mengiringi peradaban umat manusia. Sehingga bentuk negara Islam yang dikonsepsikan oleh Ali Hasjmy tersebut tidak dapat dipahami secara simbolik. Berikut konfigurasi dari kesimpulan tentang pemikiran politik Ali Hasjmy.



Berdasarkan hasil penelitian tesis dapat dipahami bahwa pemikiran politik Ali Hasjmy mengandung berbagai pengelompokan, mulai yang bersifat sifat politik, style politik, tipologi politik, legitimasi politik, implikasi politik, kenderaan politik, kebijakan politik hingga ke pendekatan politik. Semua pengelompokan tersebut terhimpun dalam satu pemikiran politik Ali Hasjmy yang bersifat teologis interkoneksi.

A. Saran

Tulisan yang tertera di atas merupakan bagian dari hasil penelitian penulis tentang konsep pemikiran politik Ali Hasjmy tentang negara Islam. Berbagai temuan yang penulis dapatkan merupakan hasil dari kualitas analisis penulis, sehingga hasil penelitian ini penting untuk ditinjau kembali untuk mencapai tingkat kevaliditas yang lebih tinggi. Dengan demikian, penulis berharap kepada pembaca untuk dapat melakukan studi komparasi baik melalui komparasi data primer dengan tulisan ini ataupun komparasi tulisan ini dengan data sekunder lainnya. Sisi lainnya, terdapat beberapa tema penelitian menarik tentang Ali Hasjmy, seperti tema penelitian tentang model persuasif dan manajemen politik Ali Hasjmy, serta konsepsi teologi Islam dalam perspektif Ali Hasjmy.

Khusus kepada para birokrat, akademisi, dan mahasiswa di Aceh, harus dipahami bahwa pemikiran politik Ali Hasjmy sangat baik untuk diteladani dalam menciptakan Aceh dalam meraih masa keemasan layaknya kesuksesan yang telah diraih oleh generasi Aceh terdahulu. Makna yang tersirat dibalik pemikiran politik Ali Hasjmy tersebut terdapat nilai Islam universal yang mampu berkolaborasi dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la Maududi, *Hukum Pemerintahan Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990.
- Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran: Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmed Vaezi, *Pemikiran Politik Syi'ah*, terj. Ali Syahab, Jakarta: Penerbit Citra, 2006.
- Ali Hasjmy, *Aceh dan Pahang*, Banda Aceh: Lemabaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 1989.
- _____. *Apa Tugas Sastrawan sebagai Khalifah Allah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- _____. dkk, *Asmara dalam Pelukan Pelangi*, Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1963.
- _____. *Bermandi Tjahaja Boelan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- _____. *Bunga Rampai Revolusi Tanah Aceh*, Jakarta: Bulan Bintang 1978.
- _____. *Cahaya Terbenam*, Singapura: Saw Tocs, 1976.
- _____. *Dakwah Islamiyah dan Kaitan dengan Pembangunan Manusia*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 1976.
- _____. dkk, *Dari Seni ia Bersemi*, Banda Aceh: Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, 1981.
- _____. *Dasar-Dasar Negara Islam*, Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1969.
- _____. *Darussalam*, Banda Aceh: tp, ttt.

- _____. *Dimana Letak Negara Islam*, Singapura: Shing Loong Press, 1970.
- _____. *Iktisar Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Penerbit & Penyiaran IAIN Ar-Raniry Darussalam, 1975.
- _____. *Jembatan Selat Malaka, Aceh Pusat Peradaban Melayu*, Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1997.
- _____. *Kisah Seorang Pengembara*, Medan: Pustaka Islam, 1993.
- _____. *Misi Haji Menjalankan Tugas Revolusi di Negara-negara Arab*, Bandung: Al-Maarif, 1984.
- _____. *Melalui Jalan Raya Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- _____. *Muktasar Kuliah Tentang Publisistik*, Banda Aceh: Fakultaas Dakwa IAIN Ar-Raniry, 1969.
- _____. *Para Sahabat yang Gugur di Zaman Nabi*, cet,II, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____. *Pemimpin dan Akhlak*, Banda Aceh: Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1973.
- _____. *Pengaruh Surat al-'Alaq dalam Kehidupan Ilmiah A. Hasjmy*, Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1991.
- _____. *Peran Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- _____. *Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh, Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali*, Banda Aceh: Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980.
- _____. "Persatuan dan Keamanan Syarat Mutlak bagi Pelanjutan Pembangunan", dalam Naskah Khutbah Sholat Idul Adha, di Sabang, 23 Juni 1991.
- _____. *Pokok-Pokok Pemikiran Dakwah Islamiyah: Sebuah Tinjauan Tentang Sifat, Sasaran dan Cara Pelaksanaan Dakwah*, Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1997.
- _____. *Meurah Johan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1075.
- _____. *Sastra dan Agama*, Banda Aceh: Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980.

- _____. *Semangat Merdeka*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- _____. *Semangat Merdeka dalam Sajak Indonesia Baru*, Banda Aceh: Perpustakaan Putroe Tjanden, 1963.
- _____. *Suara Azan dan Lonceng Gereja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- _____. *Risalah Aklhak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- _____. *Surat-Surat dari Penjara*, Bulan Bintang: 1976.
- _____. *Surat-Surat dari Tanah Suci*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- _____. *Tanah Merah: Bumi Pahlawan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- _____. *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- _____. "Bahasa dan Kebudayaan Melayu Raya", dalam *Waspada*, terbitan Selasa 14 April 1992.
- _____. *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- _____. *Semangat Kemerdekaan dalam Sajak Indonesia Baru*, Banda Aceh: Pustaka Putro Canden, 1963.
- _____. *Di Manakah Letak Negara Islam*, Singapura: Pustaka Nasional Singapura, 1970.
- _____. *Mimpi-Mimpi Indah di Rumah Sakit MMC*, Banda Aceh: Gua Hira', 1993.
- _____. *Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Islam*, Banda Aceh: Lembaga Penerbit IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1969.
- _____. *Seorang Wanita Telah Membina Kepribadian Ali Hasjmy Sejak Dini*, Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1993.
- _____. *Semangat Merdeka*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- _____. *Semangat Kemerdekaan dalam Sajak Indonesia Baru*, Banda Aceh: Pustaka Putro Canden, 1963.
- _____. *Sumbangan Kesusasteraan Aceh dalam Pembinaan Kesusasteraan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

_____. *Pemimpin dan Akhlaknya*, Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1973.

_____. *Sejarah Pemikiran Ummat Islam dalam Pemikiran dan Pembangunan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1979.

_____. *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

_____. *28 Bulan Tiga Hari Jadi Aku dan Hani dan September Berdarah*, Banda Aceh: Yaayasan Museum Ali Hasjmy, 1994.

_____. *80 Tahun Melalui Jalan Raya Dunia*, Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1993.

_____. *Lintasan Sejarah Pemikiran: Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ameer Hamzah, "In Memoriam A. Hasjmy", dalam Majalah Santunan, no. 235 Tahun 1999.

_____. *Mutiara (Kalam) Hikmah Prof. H. Ali Hasjmy*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.

Azyumardi Azra, ed. *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998.

Badruzzaman Ismail, dkk, A. *Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan: Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Bahdin Nur Tanjung, Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005.

Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy*, Totowa New Jersey: Adam & Co, 1971.

Dale F. Eickelman, James Piscatori, *Politik Muslim*, terj, M. Rahman Bandung: Mizan, 1998.

Fachry Ali, Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1996.

Faisal Ismail, *Ketegangan Kreatif Peradaban Islam: Idealisme Versus Realisme*, Jakarta: Bakti Aksara Persada, 2003.

- H.A Ghazaly, *Biografi Teungku H. Ali Hasjmy*, Jakarta: SOCILIA, 1978.
- Hardi, *Daerah Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta: Cita Pauca Serangkai, 1993.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Toha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Bereueh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, cet.II, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014.
- Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral dan Politik*, Gramedia: Jakarta, 1986.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M. Hasbi Amiruddin, *Ulama, Separatisme dan Radikalisme di Aceh*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- _____. *Relasi Islam dan Negara*, Magelang: Yayasan Indonesia Sejahtera, 2001.
- Khalid Ibrahim Jiddan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Laode M. Kamaluddin, ed. *On Islamic Civilization*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2010.
- M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita-Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1996.
- Mahmud Saleh, *Pemikiran Muhammad Natsir dan Hasan Al-Banna tentang Negara Islam*, Banda Aceh: Lhee Sagoe, 2015.
- M. Arskal Salim GP, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- M. Aunul Abied Shah, dkk, *Islam Garda Depan: Muzaik Pemikiran Timur Tengah*, Bandung: Mzan, 2001.
- M. Hasbi Amiruddin, dkk, *Biografi Rektor IAIN Ar-Raniry: Kepemimpinan IAIN Ar-Raniry dari Masa ke Masa*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Muhammad Baqir ash-Shadr, *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir ash-Shadr terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, terj. M.Nur Mufid bin Ali, Bandung: Mizan, 1991.

Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: Murai Kencana, 2004.

Muhammad Thalal, dkk. *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Aceh mandiri, 2010

M. Natsir, *Capita Selecta*, Bulan Bintang, 1079.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.

M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 20014

M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press 2006.

Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, cet.XI*, Bandung: Mizan, 1998.

Philip K. Hitti, *History of the Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penulusuran Paradigma*, terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Rusdi Sufi, Agus Bidi Wibowo, *Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

Sirajuddin, *Pergulatan Konsep Kenegaraan di Aceh: Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Jakarta: Studio Press, 2005.

Syamsul Rijal, *Dinamika Pemikiran Islam di Aceh: Membedah Toleransi Kearifan Lokal dan Kehidupan Sosial di Aceh*, Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2011.

_____. *Refleksi Sosiologis Masyarakat Modern*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2015.

Sukron Kamil, *Pemikiran Islam Tematik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Tariq Ramadan, *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat dan Tantangan Modernitas*, terj. Zubair, Ilham B.Sainong, Jakarta: Teraju, 2003.

Varma Sp, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Wildan, *Nasionalisme dan Sastra: Doktrin, Misi, dan Teknik Penyampaian Nasionalisme dalam Novel Ali Hasjmy*, Banda Aceh: Ceuci, 2011.